



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIZAL
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 132988

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 16.867.551.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 194.272.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 194.272.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/332 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.946.466.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 997.200.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/510 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 6.173.100.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 421 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 4.530.255.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 1.501.702.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 924 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 1.330.284.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 578.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, WRANGLER JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



3. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000

4. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 458.399.500

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.848.312.861

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 19.752.263.361

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 19.752.263.361

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.